

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghufron, Nurul, 2014, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Radja, Surabaya.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini, Sri, dkk, 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Marbun, SF. dan Mahfud, Moh., 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Muhadar, dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tjandra, Riawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tjandra, W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Tanggal 10 Agustus 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

C. JURNAL

Arjuno, Bambang, dkk, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia", *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017.

Matondong, Fiskia Joan, "Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 3, Mei 2015.

Nixon, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Volume II, Nomor 2, November 2013.

Novian, Rully, “Perlindungan LPSK Bagi Pelapor (Whistleblower) yang Berstatus PNS dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Perlindungan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2015.

Valentina, Bella, dkk, “Implementasi Whistle Blower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Poenal*, Volume 5, Nomor 3, 2017.

D. KARYA ILMIAH

Badawi, Kholis, 2011, “Kebijakan Legislatif Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.

Muladi, Aditya Wisnu, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Sinaga, Hoplen, 2008, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sodiq, Moh., 2014, “Penerapan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sujatmiko, Bambang, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi UGM, Yogyakarta.

E. INTERNET

“Hukum”, <https://kbbi.web.id/hukum> diunduh pada tanggal 17 Juni 2020.

“ICC Guidelines on Whistleblowing (2008), International Chamber of Commerce”, https://setkab.go.id/whistleblowing-system-wbs-langkah-awal-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp5899cb77f19df=c931676a19 diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019.

“Korupsi”, <https://kbbi.web.id/korupsi> diunduh pada tanggal 21 Januari 2020.

“Perlindungan”, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diunduh pada tanggal 17 Juni 2020.

“Reformasi Birokrasi”, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan> diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019.

“Saksi”, <https://kbbi.web.id/saksi> diunduh pada tanggal 23 Januari 2020.

Desmond J. Mahesa, “Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia”, <https://akurat.co/news/id-866437-read-praktik-penetapan-perlindungan-dan-penghargaan-justice-collaborator-di-indonesia> diunduh pada tanggal 07 Mei 2020.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) : Langkah Awal Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, https://setkab.go.id/whistleblowing-system-wbs-langkah-awal-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/?yop_poll_tr_id=&yop-poll-nonce-1_yp5899cb77f19df=c931676a19 diunduh pada tanggal 30 Oktober 2019.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Berpotensi Mengungkap Tipikor, Namun Nasib ASN Justru Terancam”, https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2897 diunduh pada tanggal 27 Januari 2020.

Muji Kartika Rahayu, dkk, 2017, “Laporan Riset Sistem Perlindungan Terhadap Pelapor, Saksi dan Korban Dalam Konteks”, <http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/10/laporan-ri-set-WBS.pdf> diunduh pada tanggal 7 Mei 2020.

INDEKS ISTILAH

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	1, 82
Demosi	68, 71
Diskredit	78, 89, 93, 99
Diskriminasi	74, 76, 85
<i>Justice Collaborator</i>	4, 6, 16, 17, 38, 55, 66, 91
Mutasi	6, 7, 68, 69, 71, 73, 74, 78, 89, 93
Reformasi Birokrasi	1, 2, 5, 62, 82, 83
Rotasi	68, 71
Unifikasi	91
<i>Whistle Blowing System</i>	2, 3, 7, 62, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 100, 102
<i>Whistleblower</i> ...	3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 37, 38, 39, 40, 46, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

INDEKS SUBYEK

B

Baharuddin Lopa.....	41, 45
Bambang Poernomo	23
Bambang Waluyo	47

D

David M. Chalmers	41
Desmond J. Mahesa	91

E

Evi Hartanti	44
--------------------	----

F

F. Sugeng Istanto.....	59
Floriano C. Roa	39

H

Hasto Atmojo Suroyo	80, 86, 87, 88, 94
---------------------------	--------------------

I

I.S. Susanto	21
--------------------	----

M

Mahfud M.D.	29
Maria SW. Sumardjono.....	59

Mukti Fajar..... 50

Mulyana Wirakusumah 39

P

Philipus M. Hadjon 20, 23

Q

Quentin Dempster 40

R

Rully Novian 53, 70, 71, 72, 86, 91, 93

S

Satjipto Rahardjo 20, 75

Shed Husein Alatas 45

Soedikno Mertokusumo 20

Soerjono Soekanto 47, 49, 50

Subekti 41

T

Tjitrosoedibio 41

Y

Yudi Kristiana 41

Yulianto Achmad 50

GLOSARIUM

A

Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik

Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

D

Demosi

Pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah.

Diskredit

Berusaha untuk menjelekkan atau memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu

Diskriminasi

Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

J

Justice Collaborator

Saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di persidangan.

M

Mutasi

Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain.

R

Reformasi Birokrasi

Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Rotasi	Perputaran atau perpindahan pegawai secara sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam suatu unit kerja.
U Unifikasi	Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam.
W <i>Whistle Blowing System</i>	Suatu sistem yang dibentuk sebagai sarana pelaporan bagi kalangan internal instansi maupun masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang dianggap menyimpang dari peraturan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang bekerja pada instansi yang bersangkutan.
<i>Whistleblower</i>	Pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.